



Budaya Melayu Berintegritas

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Modul Diseminasi Gugus Depan Integritas
Tahun 2017



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

KATA PENGANTAR

Era globalisasi dengan ciri utama kompetitif dan kemajuan teknologi telah menimbulkan pergeseran dalam tatanan kehidupan, sehingga nilai-nilai dasar dalam kehidupan tergerus oleh waktu. Salah satu nilai dasar tersebut adalah nilai-nilai integritas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Menyadari akan hal tersebut diperlukan upaya dan langkah-langkah untuk membangun budaya integritas, baik melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Pegawai negeri sipil sebagai aparatur sipil negara, memiliki posisi penting dan strategis dalam pembangunan budaya integritas individu, organisasi dan nasional. Sehubungan dengan itu salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membekali pemahaman dan implementasi nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pelaksanaan Gugus Depan Integritas merupakan upaya pembekalan pemahaman dan implementasi nilai-nilai integritas bagi pegawai negeri sipil. Agar pemahaman akan nilai tersebut lebih optimal keberadaan modul, sehingga para pegawai negeri sipil lebih dapat memahami dan menjelaskan konsep-konsep Integritas dalam membangun Integritas dari aspek Individu, Organisasi dan Nasional, budaya melayu berintegritas, serta menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara sebagai kewajiban dan bentuk kongkrit implementasi nilai-nilai integritas.

Selanjutnya kami atas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengucapkan terima kasih kepada tim penulis yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk pengayaan terhadap isi modul ini. Kami mengharapkan pengembangan akan materi modul ini berkelanjutan seiring dengan pelaksanaan Desiminasi Gugus Depan Integritas serta modul ini dapat mencapai tujuan

pembelajaran dan membentuk karakter pegawai negeri sipil berintegritas dalam membangun budaya integritas di Provinsi Riau.

Pekanbaru, Juli 2017

KEPALA BPSDM PROVINSI RIAU,

Drs. ASRIZAL, M.Pd

TIM PENYUSUN

Mohamad Zainuri, S.ST., MP
Widyaiswara Muda

Ir. Mahfayeri, M.Pd
Widyaiswara Utama

Suparman, A.Ks, S.Pd.I., M.Si
Widyaiswara Madya

Dany Setyawan, AP, M.Si
Widyaiswara Muda

NARA SUMBER

Drs. Kasiaruddin Jalil
Drs. H. Arlizman Agus, MM
Ir. A. Patrianov

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
BAB II BUDAYA MELAYU BERINTEGRITAS	3
A. Konsep Budaya Melayu Berintegritas	3
B. Sumber Adat Budaya Melayu	5
1. Adat Sebenar Adat	5
2. Adat yang diadatkan	6
3. Adat yang teradat	9
C. Implementasi Adat-Istiadat Budaya Melayu Dalam Pelayanan Publik	11
1. Bertutur Kata	12
2. Cara Berpakaian	13
3. Adat Pergaulan	15
BAB III PENUTUP	17
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi integritas pegawai negeri sipil Provinsi Riau sudah harus dilakukan. Bahkan sudah diatur pelaksanaannya di peraturan perundangan di Negara kita. Integritas pegawai negeri sipil sudah menjadi salah satu penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Implementasi nilai kejujuran, konsistensi dan keberanian menjadi dasar pelayanan yang harus dimiliki seorang pegawai negeri sipil.

Integritas itu sendiri pada hakekatnya telah ada sejak kita dunia ini ada. Integritas tersebut melekat di dalam diri setiap orang, dan berkembang dalam kehidupan keluarga, suku, daerah dan bangsa. Begitu juga dengan masyarakat melayu memiliki nilai-nilai budaya integritas yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya.

Masyarakat Melayu menurunkan nilai integritas (kejujuran, konsistensi, dan keberanian) dengan cara adat budaya melayu yaitu mengajar dan mensosialisasikan kepada anak cucu melalui tutur kata dan perilaku sehari baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan organisasi. Secara historis dan tertulis nilai-nilai tersebut tertuang dalam “Tunjuk Ajar Melayu” dan “Gurindam 12”. Dua hal penting dalam mewariskan Budaya Melayu di Provinsi Riau yaitu sumber adat dan implementasi adat istiadat. Budaya Melayu bersumber dari adat sebenarnya, adat yang diadatkan dan adat yang teradat. Sedangkan implementasi adat-istiadat atau nilai-nilai budaya

melayu diwujudkan dalam bertutur kata, cara berpakaian, dan adat pergaulan.

Oleh karena itu, penting bagi para pegawai negeri sipil sebagai bagian dari masyarakat melayu untuk mengimplementasikan integritas dengan cara Adat Budaya Melayu di dalam pelayanan publik. Pegawai negeri sipil perlu memperhatikan peraturan sebagai sumber atau pedoman dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, pelaksanaan pelayanan publik dengan cara adat istiadat budaya melayu.

B. Maksud dan Tujuan

Materi Budaya Melayu Berintegritas diajarkan dalam desiminasi ini dimaksudkan agar para Pejabat Administrasi memahami pentingnya Adat Istiadat Budaya Melayu dapat diterapkan dalam pelayanan publik. Selain itu, bagaimana utilisasi adat istiadat budaya melayu yang dalam pelayanan publik.

Kurikulum desiminasi Gugus Depan Integritas pada materi budaya melayu berintegritas di Pemerintah Provinsi Riau bertujuan menyampaikan informasi, edukasi, utilisasi adat istiadat budaya melayu dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan sub materi Konsep Budaya Melayu Berintegritas, Sumber Adat Budaya Melayu, dan Implementasi Adat Istiadat Budaya Melayu dalam Pelayanan Publik.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Materi Budaya Melayu Berintegritas terdiri dari konsep budaya melayu berintegritas, sumber adat budaya melayu, dan implementasi adat istiadat budaya melayu dalam pelayanan publik.

BAB II

BUDAYA MELAYU BERINTEGRITAS

A. Konsep Budaya Melayu Berintegritas

Budaya Melayu Riau, adalah budaya yang terbuka. Keterbukaan Melayu berdampak berkembangnya majemuk masyarakat dan budayanya. Kemajemukan inilah sebagai salah satu khasanah budaya Melayu yang tangguh, serta sarat dengan keberagaman. Karenanya, orang mengatakan bahwa budaya Melayu bagaikan pelangi atau taman bunga yang penuh warna warni, indah dan memukau. Salah satu khasanah budaya Melayu yang paling sarat dengan nilai-nilai utama sebagai jatidiri kemelayuan itu adalah adat istiadatnya atau dikatakan adat resam.

Melalui proses keterbukaan itu pula adat resam Melayu menjadi kaya dengan variasi, sarat dengan simbol (lambang) dan falsafah. Kekayaan khasanah nilai itu dapat disimak antara lain dari keberagaman alat dan kelengkapan upacara adat, dari alat dan kelengkapan pakaian pakaian adat, dari bentuk dan ragam hias rumah, dari alat dan kelengkapan ruamh tangga, dari upacara-upacara adat dan tradisi, dari ungkapan-ungkapan adat (pepatah petiti, bidal, ibarat, perumpamaan, pantun, gurindam, seloka, syair dll), yang mereka warisi turun temurun. Karenanya, tidaklah berlebihan bila ada yang berpendapat, bahwa khasana budaya Melayu merupakan samudera budaya dunia, sebab di dalam budaya Melayu memang terdapat berbagai unsur budaya dunia. Dengan sifat keterbukaan itu pula budaya Melayu mampu menyerap beragam unsur budaya luar, sehingga memperkaya khasanah budaya Melayu itu sendiri.

Peranan adat nampaknya tidak lagi sekuat dahulu, sehingga fungsi penapisnya juga turut luntur dan melemah. Akibatnya, di dalam masyarakat Melayu Riau, banyak sudah unsur-unsur negatif budaya luar yang masuk dan merebak kedalam masyarakat Melayu, terutama melanda generasi mudanya. Indikasi ini dengan mudah dapat disimak, antara lain dari berkembangnya kemaksiatan (prostitusi, perjudian, minuman keras, narkoba, tindakan kejahatan dll), yang menjangkau sampai ke pelosok-pelosok perkampungan Melayu.

Menurunnya wibawa adat, menyebabkan terjadi semacam krisis akhlak, sehingga banyak sudah anggota masyarakat adat Melayu yang tidak lagi berperilaku sebagai orang beradat, tetapi berubah menjadi orang yang emosional, menjadi orang yang kasar langgar, menjadi orang yang kehilangan sopan santun, menjadi orang yang bangga dengan hujat menghujat, menjadi orang yang berburuk sangka, menjadi orang yang hidup nafsu nafsi, menjadi orang yang mau menang sendiri, menjadi orang yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya semata dan sebagainya.

Pegawai negeri sipil Provinsi Riau sebagai penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayan masyarakat perlu menerapkan budaya melayu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara jujur, konsisten, dan berani. PNS harus dapat menjaga Budaya Melayu sebagai nilai kehidupan sehari-hari di Kantor (organisasi) dan masyarakat.

Dalam menggunakan budaya melayu dalam kehidupan sehari-hari pegawai negeri sipil Provinsi Riau perlu mengembangkan dan mengimplementasikan nilai ada istiadat Melayu dalam setiap tugas. Beberapa kegiatan budaya ini dapat dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai utama sebagai jatidiri

kemelayuan. Jati diri kemelayuan adalah adat istiadatnya atau dikatakan adat resam. Jati diri tersebut dilihat dari cara bertutur kata, cara berpakaian, dan adab pergaulan.

B. Sumber Adat Budaya Melayu

1. Adat Sebenar Adat

Adat sebenar adat adalah prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah-ubah. Prinsip tersebut tersimpul dalam adat bersendikan syarak. Ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan hukum syarak tidak boleh dipakai lagi dan hukum syaraklah yang dominan. Dalam ungkapan dinyatakan:

Adat berwaris kepada Nabi

Adat berkhalifah kepada Adam

Adat berinduk ke ulama

Adat bersurat dalam kertas

Adat tersirat dalam sunah

Adat dikungkung kitabullah

Itulah adat yang tahan banding

Itulah adat yang tahan asak

Dari ungkapan di atas jelas terlihat bahwa adat istiadat Melayu didasari ajaran agama yaitu Islam. Dasar adat istiadat Melayu menghendaki sunah Nabi dan Al Quran sebagai pedoman dalam setiap tindakan. Prinsip itu tidak dapat diubah, tidak dapat dibuang, apalagi dihilangkan, itulah yang disebut adat sebenar adat.

Dalam ruang lingkup pragmatis seperti pelayanan publik, adat istiadat Budaya Melayu dapat diterapkan dengan mengacu kepada hal-hal keteguhan tindakan, sikap perilaku dan etika para Pejabat Administrasi. Para Pejabat

Administrasi yang beragama Islam harus patuh dan taat kepada Allah SWT. Dalam konteks ini, Para Pejabat Administrasi harus jujur, konsisten dan berani dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai manusia, Para Pejabat Administrasi dapat bermohon do'a setiap pagi sebelum memulai tugas dan setiap sore setelah menyelesaikan tugas. Selain itu, dalam menyelesaikan masalah pelayanan perlu pendekatan peraturan dan agama sebagai pedoman.

2. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan adalah adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh penguasa berikutnya. Adat ini dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman, sehingga dapat disamakan dengan peraturan pelaksanaan dari suatu ketentuan adat. Perubahan terjadi karena menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perkembangan pandangan pihak penguasa, seperti kata pepatah Sekali air bah, sekali tepian beralih. Dalam ungkapan disebutkan:

Adat yang diadatkan

Adat yang turun dari raja

Adat yang datang dari datuk

Adat yang cucur dari penghulu

Adat yang dibuat kemudian

Ungkapan di atas, memberikan tunjuk ajar bahwa perintah pimpinan senantiasa dipedomani dan dilaksanakan oleh para Pejabat Administrasi. Oleh karena itu, seorang

pemimpin harus memiliki nilai kejujuran, konsistensi dan keberanian sesuai dengan adat istiadat Budaya Melayu. Sehingga seorang pemimpin menjadi pedoman bagi para bawahan dan mitra kerja serta masyarakat yang dilayani.

Nilai adat yang turun dari raja, datuk, penghulu yang diadatkan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pelayanan publik, perintah seorang pemimpin harus menjadi pedoman pelayanan. Sebelum membuat perintah pemimpin harus mempertimbangkan berbagai nilai seperti agama dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya petuah-petuah yang diajarkan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam Dua Belas juga memberikan bimbingan bagi anggota masyarakat Melayu tentang seharusnya orang Melayu bersikap dan bertingkah-laku sesuai dengan yang diinginkan oleh adat Melayu. Gurindam Dua Belas memuat dua belas pasal. Sebagai gambaran, berikut kutipan pasalnya:

Pasal lima

Jika hendak mengenal orang yang berbangsa

Lihat kepada budi dan bahasa

Jika hendak mengenal orang yang berbahagia

sangat memeliharakan yang sia-sia

Jika hendak mengenal orang mulia

Lihatlah kepada kelakuan dia

Jika hendak mengenal orang yang berilmu

Bertanya dan belajar tidaklah jemu

Jika hendak mengenal orang yang berakal

Di dalam dunia mengambil bekal

*Jika hendak mengenal orang yang baik perangai
Lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai*

Bait Gurindam di atas, memberikan ajaran bahwa seorang dalam bersikap dan bertingkah laku sebagai adat istiadat Budaya Melayu. Ajaran tersebut adalah dalam berbangsa atau bersuku atau berkelompok atau berorganisasi seseorang harus memiliki budi dan bahasa yang baik. Budi dan bahasa yang baik sudah dicontohkan dalam agama dan adat istiadat. Apalagi adat istiadat Budaya Melayu, nilai adat istiadat diambil dari nilai-nilai agama.

Sehingga para Pejabat Administrasi diharapkan dalam bersikap di dalam memberikan pelayanan publik harus memiliki budi dan bahasa yang baik seperti yang telah diajarkan dalam agama dan adat istiadat. Selain itu, Pejabat administrasi menjadi orang mulia dengan baik kelakuannya, menjadi orang yang berilmu dengan senantiasa bertanya dan belajar tanpa jemu, serta ramah sehingga disukai oleh banyak orang.

Selanjutnya para penguasa (raja) mengatur hak dan kewajiban para kawula menurut tingkat sosial mereka. Hak-hak istimewa raja dan para pembesar diatur dan diwujudkan dalam bentuk rumah, bentuk dan warna pakaian, kedudukan dalam upacara-upacara, dan larangan bagi rakyat biasa untuk memakai atau mempergunakan jenis yang sama. Dengan demikian tercipta ketentuan-ketentuan yang berisi suruhan dan pantangan. Di samping itu juga tercipta kelas-kelas dalam masyarakat yang pada umumnya terdiri dari raja dan anak raja-raja, orang baik-baik, dan orang kebanyakan.

Kelas tersebut memberikan pemikiran bahwa seorang pejabat administrator harus menjaga diri dari pantangan-pantangan yang telah diatur dalam agama dan adat istiadat. Selain itu, mereka harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini akan mendudukan seorang pejabat administrator menjadi orang baik-baik atau kebanyakan.

Dalam melaksanakan pelayanan publik, seorang pejabat harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Tindakan pelayanan harus mempertimbangkan peraturan dan nilai agama serta adat istiadat. Seorang pejabat harus menghindari pantangan dengan tidak melakukan penyelewengan dan kesalahan dalam pelayanan.

3. Adat yang teradat

Adat ini merupakan konsensus bersama yang dirasakan baik, sebagai pedoman dalam menentukan sikap dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Konsensus itu dijadikan pegangan bersama, sehingga merupakan kebiasaan turun-temurun. Oleh karena itu, adat yang teradat ini pun dapat berubah sesuai dengan nilai-nilai baru yang berkembang. Tingkat adat nilai-nilai baru yang berkembang ini kemudian disebut sebagai tradisi.

Pelanggaran terhadap adat ini sanksinya tidak seberat kedua tingkat adat yang disebutkan di atas. Jika terjadi pelanggaran, maka orang yang melanggar hanya ditegur atau dinasihati oleh pemangku adat atau orang-orang yang dituakan dalam masyarakat. Namun, si pelanggar tetap dianggap sebagai orang yang kurang adab atau tidak tahu adat. Ketentuan adat ini biasanya tidak tertulis, sehingga pengukuhananya dilestarikan dalam ungkapan yang disebut

“pepatah adat” atau “undang adat”. Apabila terjadi kasus, maka diadakan musyawarah. Dalam musyawarah digunakan “ungkapan adat” yang disebut “bilang undang”. Hal ini dijelaskan dalam ungkapan berikut:

Rumah ada adatnya

Tepian ada bahasanya

Tebing ditingkat dengan undang

Negeri dihuni dengan lembaga

Kampung dikungkung dengan adat

Ungkapan di atas, menjelaskan bahwa adat telah mengajarkan setiap tempat memiliki kebiasaan, komunikasi, peraturan dan nilai. Orang yang tinggal di tempat tersebut harus patuh terhadap peraturan yang ada. Nilai yang baik haruslah diimplementasikan oleh orang tersebut. Dalam organisasi pelayanan publik ada pejabat dan pelaksana. Keduanya harus menjalankan nilai baik yang ada.

Selanjutnya “bilang undang” itu mempunyai sifat-sifat petunjuk, seperti yang tersirat dalam ungkapan berikut:

Hukum sipalu palu ular

Ular dipalu tidak mati

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan adat yang lebih dikenal sebagai hukum tidak tertulis telah diwariskan dalam bentuk undang-undang, ungkapan, atau pepatah-petitih. Hukum yang ditegakkan guna memberikan petunjuk dan peringatan agar seseorang jera dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, orang tersebut melakukan tindakan-tindakan yang baik.

C. Implementasi Adat-Istiadat Budaya Melayu dalam Pelayanan Publik

Interaksi sosial antara sesama warga negara dalam masyarakat majemuk itu menuntut kerangka rujukan (term of reference) maupun mekanisme pengendali yang mampu memberikan arah dan makna kehidupan bermasyarakat, yaitu kebudayaan yang dapat menjembatani pergaulan sesama warga negara secara efektif.

Adat-istiadat yang merupakan pola sopan-santun dalam pergaulan orang Melayu di Riau sebenarnya sudah lama menjadi pola pergaulan nasional sesama warga negara. Bahasa Melayu yang telah menjadi bahasa nasional Indonesia mengikutsertakan pepatah, ungkapan, peribahasa, pantun, seloka, dan sebagainya yang hidup dalam masyarakat Melayu menjadi milik nasional dan dipahami oleh semua warga negara Indonesia. Ajaran, tuntunan, dan falsafah yang diajarkan melalui pepatah, peribahasa, dan sebagainya itu telah membudaya di seluruh Indonesia, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi pepatah dan peribahasa yang berasal dari Melayu dan yang bukan dari Melayu.

Dalam masyarakat Melayu di Riau, sikap dan tingkah-laku yang baik telah diajarkan sejak dari buaian hingga dewasa. Sikap itu diajarkan secara lisan dan dikembangkan melalui tulisan-tulisan. Raja Ali Haji, pujangga besar Riau telah banyak meninggalkan ajaran-ajaran seperti Gurindam Dua Belas, Samaratul Muhimmah, dan manuskrip-manuskrip lainnya.

Sopan-santun dalam pergaulan sesama masyarakat menyangkut beberapa hal, yaitu tingkah-laku, tutur-bahasa, kesopanan berpakaian, serta sikap menghadapi orang tua/orang sebaya, orang yang lebih muda, para pembesar, dan sebagainya.

Tingkah-laku yang terpuji adalah yang bersifat sederhana. Pola hidup sederhana yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan sifat ideal orang Melayu.

Kesederhanaan memang sudah menjadi sifat dasar orang Melayu sehingga terkadang karena salah bawa menjadi sangat berlebihan. Kesederhanaan ini membawa sifat ramah dan toleransi yang tinggi dalam pergaulan. Kesederhanaan ini digambarkan pula dalam pepatah Mandi di hilir-hilir, berkata di bawah-bawah, Ibarat padi, kian berisi kian runduk. Gotong-royong dan seia sekata sangat dianjurkan. Banyak pepatah dan ungkapan yang menjadi falsafah hidup orang Melayu bertahan sampai sekarang, seperti misalnya:

Berat sama dipikul

Ringan sama dijinjing

Ungkapan-ungkapan yang menyangkut kebersamaan masih sangat banyak, karena masalah gotong royong dan kerukunan bersama merupakan masalah penting dalam pergaulan orang Melayu. Adat-Istiadat Dalam Pergaulan Orang Melayu di Riau diwujudkan dalam tutur kata, sopan santun berpakaian dan adab pergaulan

1. Bertutur Kata

Bertutur dan berkata, ditemukan dalam memberikan nasihat, karena kata berpengaruh bagi keselarasan pergaulan, “Bahasa menunjukkan bangsa”. Pengertian “bangsa” yang dimaksud di sini adalah “orang baik-baik” atau orang berderajat yang juga disebut “orang berbangsa”. Orang baik tentu mengeluarkan kata-kata yang baik dan tekanan suaranya akan menimbulkan simpati orang. Orang yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh, dia tentu

orang yang “tidak berbangsa” atau derajatnya rendah. Bahasa selalu dikaitkan dengan budi, oleh karena itu selalu disebut “budi bahasa”. Dengan demikian, ketinggian budi seseorang juga diukur dari kata-katanya, seperti ungkapan:

Hidup sekandang sehalaman

Tidak boleh tengking-menengking

Tidak boleh tindih-menindih

Tidak boleh dendam kesumat

Oleh karena itu, kata dan ungkapan memegang peran penting dalam pergaulan, maka selalu diberikan tuntunan tentang kata dan ungkapan agar kerukunan tetap terpelihara. Tinggi rendah budi seseorang diukur dari cara berkata-kata. Seseorang yang mengeluarkan kata-kata yang salah akan menjadi aib baginya, seperti kata pepatah “Biar salah kain asal jangan salah cakap”.

Para pejabat administrasi harus memiliki tutur kata yang baik untuk menjadi orang berderajat. Pejabat administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat haruslah dengan sopan santun, menarik dan selalu berkata benar.

2. Cara Berpakaian

Dari pepatah “Biar salah kain asal jangan salah cakap” juga tercermin bahwa salah kain juga merupakan aib. Dalam masyarakat Melayu, kesempurnaan berpakaian menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya budaya seseorang. Makin tinggi kebudayaannya, akan semakin sempurna pakaiannya. Selain itu, sopan-santun berpakaian menurut Islam telah menyatu dengan adat. Orang yang sopan,

pakaiannya sempurna, tidak bertelanjang dada, dan lututnya tidak terbuka, seperti dinyatakan dalam ungkapan:

Elok sanggam menutup malu
Sanggam dipakai helat jamu

Elok dipakai berpatut-patut
Letak tidak membuka aib

Para pejabat haruslah memakai pakaian yang baik, sopan dan dapat menutup auratnya. Para pejabat harus dapat menyesuaikan peraturan yang telah ditentukan. Para pejabat harus memberikan contoh atau keteladanan dalam berpakaian. Sehingga membentuk perilaku yang baik ketika berpakaian sesuai dengan tempat dan waktunya.

Orang Melayu sejak dahulu sudah mengenal mode, terbukti dengan adanya berbagai jenis pakaian, baik pakaian pria maupun wanita. Demikian pula perhiasan sebagai pelengkap berpakaian. Melayu mengenal penutup kepala bagi laki-laki yang disebut “tengkolok” atau “tanjak” dengan 42 jenis ikatan.

Pakaian daerah atau pakaian tradisional Melayu bermacam-macam dan cara memakainya pun disesuaikan dengan keperluan. Cara berpakaian untuk ke pasar, ke masjid, bertandang ke rumah orang, atau ke majelis perjamuan dan upacara ada etikanya sendiri-sendiri. Kerajaan Siak Sri Indrapura telah menetapkan cara berpakaian bagi para pejabat yang bekerja di balai (kantor) dan cara berpakaian rakyat yang datang ke balai dalam Babul Qawa'id. Beberapa ungkapan mengenai pakaian (Effendy, 1985):

*Seluar panjang semata kaki
Goyang bergoyang ditiup angin*

*Kibarnya tidak lebih sejengkal
Pesaknya tidak dalam amat
Elok sanggam menutup malu*

Ungkapan di atas memberikan ajaran kepada para pejabat bahwa dalam berpakaian diatur sedemikian rupa. Dalam adat diatur bahwa pakaian harus menutup aurat dan tidak membuat malu. Dalam pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah.

3. Adat Pergaulan

Pedoman adab dan sopan-santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah melembaga menjadi adat. Di dalamnya terdapat berbagai pantangan, larangan, dan hal-hal yang dianggap “sumbang”. Pelanggaran dalam hal ini menimbulkan aib besar dan si pelanggar dianggap tidak beradab. Terdapat beberapa sumbang, yaitu sumbang dipandang mata, sumbang sikap, dan sumbang kata yang pada umumnya disebut “tidak baik”.

Karakter anggota masyarakat Riau dibentuk oleh norma-norma ini. Dengan demikian tercipta pola sikap dalam pergaulan, seperti sikap terhadap orang tua, terhadap ibu bapak, terhadap penguasa atau pejabat, terhadap orang sebaya, terhadap orang yang lebih muda, antara pria dan wanita, bertamu ke rumah orang, dalam upacara, dan sebagainya. Banyak ungkapan yang kita jumpai di dalam masyarakat Melayu yang digunakan sebagai tuntunan, di antaranya sebagai berikut (Effendy, 1985):

Guru kencing berdiri

Murid kencing berlari

Kalau menyengat kupiah imam

Akan melintang kupiah makmum

Berseloroh sama sebaya

Berunding sama setara

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa dalam bergaul para pejabat harus menjadi teladan terhadap pelaksana maupun masyarakat. Kalau para pejabat memiliki sikap dan perilaku baik maka pelaksana dan masyarakat akan demikian. Jika “kupiah imam” telah dipakai (telah dilantik menjadi pejabat) maka jadilah contoh bagi pelaksananya. Seorang pejabat haruslah berseloroh sama sebaya dan berunding sama setara (pejabat haruslah menempatkan diri sesuai jabatan, tempat dan waktunya).

Karena begitu banyaknya ungkapan, maka tidak mungkin jika semuanya dikemukakan di sini. Yang jelas, dalam masyarakat Melayu Riau etika pergaulan sangat dipentingkan.

Sebagai kesimpulan, ajaran Melayu dalam kehidupan sehari-hari dapat dibaca pada kutipan: “adat bersendikan syarak” adat-istiadat Melayu Riau dinamis dan membuka diri terhadap perkembangan zaman. Etika pergaulan orang Melayu Riau telah memberikan saham dalam kehidupan antar warga Indonesia. Ajaran adat dan kebiasaan Melayu perlu dipulihkan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan sekarang.

BAB III

PENUTUP

Integritas merupakan hal yang mendasar yang sedang dibangun oleh Pemerintah dalam era globalisasi dengan ciri utama kompetitif. Melalui pembangunan budaya integritas diharapkan jati diri bangsa Indonesia tidak luntur atau tergerus oleh kemajuan dan perubahan zaman. Hasil nyata dari integritas bangsa Indonesia dapat dilihat dari capai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu, para pahlawan dan pendiri bangsa. Nilai-nilai budaya integritas tersebut seiring waktu tumbuh dan berkembang dari generasi ke generasi. Namun kemajuan zaman nilai-nilai budaya integritas dalam internalisasi mengalami kemunduran.

Menyadari akan hal tersebut agar internalisasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan, khususnya para pegawai negeri sipil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sangatlah mempunyai posisi yang strategis. Oleh sebab itu diperlukan aksi nyata untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai integritas bagi pegawai negeri sipil dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Keberadaan modul ini diharapkan untuk memberikan pemahaman nilai-nilai budaya melayu berintegritas yang pernah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan pemerintahan dan kemasayarakatan dan individu. Sehingga akan dapat mendorong aktualisasi bagi pegawai negeri sipil dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Arbuthnot & Faust, 1980. Teaching Moral Reasoning : Theory and Practice.

Brown et al, 2005. Nutrition Trough The life cycle.

Elizabeth B., Hurlock. 1990. Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Gramedia.

Foster, E. M. dalam Kohlberg, L. 1995. Tahap-tahap Perkembangan Moral, diterjemahkan oleh Drs. John de Santo dan Drs. Agus Cremers SVD, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Pertama.

Haji, Raja Ali. Gurindam Dua Belas.

<http://kpk.go.id>

Paine. 1994. managing for organizational integrity.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 52 Tahun 2014. Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah,

W. Amann,A. Stachowicz-Stanusch. 2012. Integrity in Organizations: Building the Foundations for Humanistic Management

Wisesa, Anggara. 2009. Integritas Moral dalam Konteks Pengambilan Keputusan Etis